

**UPAYA PEMBINAAN OLEH DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
MENGURANGI MASALAH SOSIAL PENGAMEN  
DI KOTA SAMARINDA**

**Heslin Papalangi, Dini Zulfiani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 4, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Upaya Pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Masalah Sosial Pengamen di Kota Samarinda.

Pengarang : Heslin Papalangi

NIM : 2002016016

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 27 Juli 2024  
Pembimbing,



**Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19781019 200604 2 003

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi</b> Administrasi Publik  <b>Dr. Fajar Apriani, M.St.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 811-824	

## UPAYA PEMBINAAN OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI MASALAH SOSIAL PENGAMEN DI KOTA SAMARINDA

Heslin Papalangi <sup>1</sup>, Dini Zulfiani <sup>2</sup>

### *Abstrak*

*Pengamen merupakan orang yang mencari uang melalui pertunjukan seperti menari atau bermain musik. Tetapi karena meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengamen. Dengan adanya permasalahan ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melakukan pembinaan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Namun pada perda tersebut tidak mengatur pengamen secara langsung sehingga Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda mengkategorikan pengamen ke dalam data tuna sosial (gelandangan, pengemis, dll). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pembinaan serta menganalisis faktor yang menghambat dalam upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan fokus penelitian Efendi yaitu pengarahan, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan serta faktor penghambat dalam upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda belum terlaksana dengan baik. Serta terdapat beberapa faktor penghambat berupa anggaran pembinaan yang minim, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pelaksanaan bimbingan sosial, kurangnya jumlah aparatur pada Bidang Rehabilitasi Sosial, serta kurangnya sosialisasi terhadap kepada masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Pengamen, Gelandangan, Pengemis, Masalah Sosial, Pembinaan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [heslinpapalangi@gmail.com](mailto:heslinpapalangi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Seluruh warga bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nilai-nilai ini menjamin masyarakat yang saling menghargai satu sama lain demi kepentingan bersama. Jika masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, masalah sosial akan muncul.

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian dalam budaya atau masyarakat yang mengancam kehidupan sebuah kelompok sosial atau mencegah terjadinya keinginan utama warganya, sehingga menghambat kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu dari banyak masalah sosial yang tak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat terutama daerah perkotaan. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi dimana individu atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan membangun kehidupan yang sejahtera.

Salah satu akibat kemiskinan di Kota Samarinda adalah timbulnya pengamen di tempat umum. Pemandangan umum memperlihatkan bahwa pengamen mengembara kemana-mana seperti di resto-resto, wisata umum seperti taman tepian Mahakam seberang Islamic Center bahkan sempat viral di beberapa sosial media seperti Instagram dan tiktok mengenai keluhan terhadap pengamen yang bersikap kasar jika tidak diberikan uang seperti membuang sandal pengunjung ke sungai Mahakam bahkan marah-marah kepada pengunjung taman tepian tersebut, maupun di beberapa lampu lalu lintas di Kota Samarinda yang dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri bahkan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Upaya pemerintah untuk menertibkan Kota Samarinda yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. tetapi dalam perda tersebut tidak merujuk kepada pengamen padahal dapat dikatakan pengamen juga merupakan sebuah permasalahan yang harus ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dalam perda tersebut pada pasal 13 menjelaskan bahwa pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dilarang meminta-minta di jalanan dan tempat umum lainnya. Walaupun di dalam pasal tersebut tidak merujuk pada pengamen, namun juga berlaku bagi pengamen. Dimana pengamen juga dilarang untuk meminta-minta di tempat umum. Namun faktanya tetap saja masih banyak pengamen yang tetap berkeliaran di Kota Samarinda.

Sejalan dengan berlakunya perda tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda juga berpartisipasi dalam hal penanganan pengamen melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya kegiatan pembinaan. Upaya pembinaan ini dilakukan secara sistematis dan terencana, serta bertujuan untuk mencegah timbulnya pengamen.

Permasalahan pengamen jika dilihat langsung sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna lalu lintas dan tempat umum lainnya.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Masih banyaknya pengamen yang berkeliaran di Kota Samarinda.
2. Tidak ada data khusus mengenai pengamen di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sehingga data pengamen masih digabungkan dengan data tuna sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: (1) Bagaimana upaya pembinaan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda, (2) Apa saja faktor yang menghambat dalam upaya pembinaan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Masalah Sosial***

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial sehingga menyebabkan kepincangan sosial (Soekanto, 2013). Adapun masalah sosial menurut Horton dan Leslie dikutip oleh Suharto (2009) adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang, tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan masalah melalui aksi sosial secara kolektif. Dalam arti, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dan perlu adanya upaya perubahan. Kemiskinan adalah salah satu dari banyak masalah sosial yang tak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Hardinandar (2019) berpendapat, kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pakaian, makanan, obat-obatan, serta tempat tinggal. Kemiskinan adalah masalah sosial yang ada di masyarakat, dan semua orang bertanggung jawab atas masalah ini namun karena kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, peran pemerintah sangat penting dalam mengurangi kemiskinan.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Anwas (2014) berpendapat, inti dari pemberdayaan masyarakat adalah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Suharto (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai serangkaian Tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat dan sebagai tujuan bahwa pemberdayaan masyarakat merujuk pada kondisi atau hasil yang diinginkan dari perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, berkuasa, atau memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupannya.

### ***Pembinaan***

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017, pembinaan adalah segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mengutamakan hak-hak dasar kemanusiaan untuk membantu anak jalanan, pengamen, pengemis, dan gelandangan. Selain itu, Thoha (2003) menyatakan, pembinaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih baik, prosedur, hasil, atau pernyataan. Efendi (2003) mengemukakan bahwa pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Pengarahan, yaitu sebuah pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan pembinaan.
2. Bimbingan, berupa bantuan yang diberikan untuk mengatasi kesulitan.
3. Pelatihan, kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna.
4. Pengawasan, suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan kegiatan pembinaan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan pembinaan tersebut.

### ***Definisi Konsepsional***

Di dalam penelitian ini, definisi konsepsional dari pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah sosial supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar kemanusiaan, berdasarkan pengarahan, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan.

### ***Metode Penelitian***

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang upaya pembinaan serta faktor penghambat dalam upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda. Pihak-pihak yang menjadi sumber data primer antara lain Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (*key informan*), Sub Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial (*key informan*), Staff Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial (*informan*) dan Kepala UPT Rumah Singgah "Terpadu" (*informan*). Serta data sekunder di peroleh dari arsip-arsip, dokumen-dokumen serta sumber internet.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) terdiri, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta verifikasi data/kesimpulan (*verifying conclusions*).

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

***Upaya Pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Masalah Sosial Pengamen di Kota Samarinda***

Upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda pada dasarnya dapat dilihat keberhasilannya melalui beberapa indikator serta pengamen merupakan obyek dalam penelitian ini. Kristiana (2009) berpendapat bahwa pengamen berupa penari, penyanyi, atau pemain musik yang bertempat tinggal tetap, berpindah-pindah dan mengadakan pertunjukan di tempat umum.

Dalam penelitian ini, ditetapkan 4 (empat) indikator yang digunakan sebagai fokus pengamatan dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Indikator yang digunakan menyesuaikan dengan teori milik Efendi. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Pengarahan**

Pengarahan yaitu suatu keinginan untuk membuat orang lain dapat mengikuti kemauannya dengan memakai kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan dengan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka Panjang suatu perusahaan (Dunie, 2018). Hal ini karena pengarahan adalah sebuah usaha untuk membuat semua sumber daya manusia bekerja dengan maksimal dan sesuai fungsinya. Maka dari itu, dalam penelitian ini pengarahan dalam upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda adalah untuk memberikan petunjuk/pedoman kepada pengamen untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat atau dipulangkan kepada keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bahwa pengamen yang tertangkap dimasukan ke Rumah Singgah “Terpadu” dibawah naungan Dinas Sosial Kota Samarinda yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan setelah itu Dinas Sosial Kota Samarinda menggali informasi pada tiap pengamen untuk didata/proses *assessment*. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1 : Proses Assessment**



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan gambar 1, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melakukan penampungan pengamen di Rumah Singgah “Terpadu”

tergantung dari kelengkapan informasi pengamen tersebut baik dari latar belakang, alamat maupun keluarganya sampai data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup jelas maka akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 sebanyak 12 orang yang dimasukan ke Rumah Singgah “Terpadu, lalu pada tahun 2022 sebanyak 28 orang serta pada tahun 2023 sejumlah 19 orang. Berikut peneliti sajikan data klien UPTD yang berada di Rumah Singgah “Terpadu” pada tahun 2021-2023 :

**Tabel 1 : Klien UPTD Rumah Singgah “Terpadu” Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	12 orang
2	2022	28 orang
3	2023	19 orang

Sumber : Rumah Singgah “Terpadu” (2024)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda telah melakukan pengarahan kepada pengamen berupa *assessment* yang dilakukan di Rumah Singgah “Terpadu”. Lama penampungan pengamen tergantung dari kelengkapan informasi dari pengamen tersebut baik latar belakang, alamat maupun keluarganya. Jika data dirasa sudah lengkap, maka akan dipulangkan kerumahnya jika merupakan masyarakat Kota Samarinda maupun akan dipulangkan ke daerahnya jika berasal dari luar Kota Samarinda.

Namun pihak Rumah Singgah “Terpadu” pernah melakukan penolakan kepada pengamen yang tertangkap. Sehingga hal ini tidak membuat pengamen menjadi kapok ataupun jera karena tidak adanya ketegasan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda maupun Rumah Singgah “Terpadu”. Walaupun dengan adanya pengarahan, pengamen tetap saja kembali ke jalanan untuk mengamen. Dapat ketahu bahwa penanganan atau pembinaan pengamen ini dilakukan tidak secara khusus melainkan digabungkan dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya seperti anak jalanan maupun gelandangan dan pengemis.

## **2. Bimbingan**

Winkel (2005) berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang dirinya sendiri, suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya. Maka dari itu, dalam penelitian ini bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ialah pembelajaran seperti pemberian sosialisasi atau penyuluhan untuk mengajak serta mendorong agar pengamen dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Bimbingan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali



dalam pertahunnya. Bimbingan yang pertama dilakukan kepada pengamen, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2 : Bimbingan Kepada Pengamen**



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Tujuan dari kegiatan bimbingan kepada pengamen agar mereka dapat merubah perilaku dan pola hidup serta pemikiran mereka kearah yang lebih baik dan dapat kembali kedalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, bimbingan kedua ditujukan kepada keluarga pengamen dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3 : Bimbingan kepada Keluarga**



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan gambar 3, bimbingan kepada keluarga ini dilakukan agar saat nantinya pengamen tersebut dipulangkan kerumahnya masing-masing, pengamen tersebut dapat mengubah pola pikirnya untuk mau bekerja dan tidak mengamen lagi serta keluarganya juga dapat memberikan arahan serta nasehat kepada pengamen agar nantinya tidak kembali turun ke jalanan.

Pada tahun 2023 sebanyak 20 orang pengamen yang mengikuti bimbingan dimana pelaksanaannya berupa sosialisasi mengenai pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir. Serta sebanyak 20 orang juga keluarga pengamen yang telah mengikuti bimbingan. Berikut tabel data pengamen dan keluarga pengamen yang mengikuti bimbingan pertama dan kedua:

**Tabel 2 : Bimbingan Pertama dan Kedua**

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Bimbingan 1	20 orang	Bimbingan kepada pengamen
2	Bimbingan 2	20 orang	Bimbingan kepada keluarga pengamen

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda telah melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yaitu bimbingan dengan cukup baik. Bimbingan yang diberikan berupa sosialisasi atau penyuluhan untuk mengajak pengamen agak dapat menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Bimbingan pertama yang diberikan yaitu bimbingan kepada pengamen, pada tahun 2023 sebanyak 20 orang dengan tujuan agar pengamen dapat mengubah sikap dan kebiasaan mereka serta pola pikir agar menjadi lebih baik dan dapat kembali ke dalam hidup bermasyarakat sesuai norma yang berlaku. Sedangkan bimbingan kedua diberikan kepada keluarga pengamen, sebanyak 20 orang baik itu suami, istri, orang tua, maupun walinya. Bimbingan yang diberikan kepada keluarga bertujuan agar keluarga dapat membimbing, mengarahkan, serta memberikan nasehat kepada pengamen agar pengamen tidak kembali turun ke jalanan lagi.

Namun terdapat permasalahan juga yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan yaitu tidak adanya sarana dan prasarana seperti ruangan/gedung yang cukup luas yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sehingga pelaksanaan bimbingan pertama dilaksanakan di Hotel Grand Sawit Kota Samarinda dan bimbingan yang kedua dilaksanakan di Hotel Radja Kota Samarinda. Pelaksanaan bimbingan terlaksana hanya 2 kali dalam setahun dapat dikatakan masih kurang dimana seharusnya kegiatan bimbingan ini harus dilakukan secara rutin sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal. Serta anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan. Hal ini tergantung dari Pendapatan Asli Daerahnya

### **3. Pelatihan**

Menurut Riniwati (2016), pelatihan merupakan aktivitas atau latihan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Tujuan dari pelatihan diantaranya : meningkatkan pengetahuan individu, membantu para individu yang mempunyai keahlian untuk bekerja, serta mempersiapkan individu untuk dapat menerima dan bekerja secara efektif satu sama lainnya. Pelatihan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dengan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023 setelah dilakukan pendataan pengamen dan terkumpul sebanyak 20 orang dapat dilihat pada tabel 2, maka akan diberikan pelatihan sesuai keinginan dan kebutuhan pengamen, pelatihan akan dilakukan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda dibawah naungan Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pelatihan keterampilan yang dilakukan dalam pembinaan pengamen yaitu

keterampilan tata boga, menjahit untuk perempuan, sedangkan pelatihan keterampilan perbengkelan sepeda motor untuk laki-laki.

Tujuan yang diinginkan dengan adanya pelatihan tersebut adalah agar pengamen mempunyai *skill* atau keahlian, agar mereka tidak turun kembali ke jalanan dan supaya mereka mandiri agar dapat berwirausaha ataupun menjadi karyawan swasta sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka agar mengurangi kemiskinan di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pelatihan kepada pengamen. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan ialah proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan Tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana (Terry, 2005). Dengan adanya pengawasan, maka kegiatan pembinaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan, maka kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan akan sulit dijalankan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ialah bahwa pengamen yang tertangkap nantinya akan dibina, setelah dibina lalu dikembalikan kepada keluarga terkhususnya yang masih warga Kota Samarinda dan dimonitoring oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda agar tidak kembali ke jalanan. Kemudian untuk pengamen yang bukan berdomisili Kota Samarinda, akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dari data temuan peneliti saat dilapangan pada tahun 2023 terdapat 25 orang warga Kota Samarinda dan luar Kota Samarinda yang dipulangkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4 : Pengamen Warga Kota Samarinda dipulangkan**



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Dari gambar 4, terlihat bahwa pengamen yang merupakan warga asli Kota Samarinda dipulangkan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda setelah mengikuti pembinaan. Dibawah ini juga gambar yang merupakan pengamen yang merupakan warga luar Kota Samarinda yang dipulangkan menggunakan kapal laut :

**Gambar 5 : Pengamen Warga Luar Kota Samarinda dipulangkan**



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Pengamen yang terjaring razia dan mengikuti pembinaan tidak bisa untuk diberikan sanksi karena tidak ada hukum yang mengatur pengamen. Maka dari itu pengamen dimasukkan ke Rumah Singgah “Terpadu” dan membuat perjanjian dan surat pernyataan. Fasilitas rumah penampungan sementara yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda berupa Rumah Singgah “Terpadu” yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Komplek, Jl. Indovice RT. 68, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 6 : Rumah Singgah “Terpadu”**



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

Pengamen yang berlatar belakang kurang mampu juga akan didaftarkan ke DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS ini memuat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan

Sosial, serta (PSKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST (Bantuan Sosial Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Pada tahun 2023, individu yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 183.812 Jiwa sedangkan untuk keluarga sebanyak 74.215 KK. Penerima DTKS di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 : Penerima DTKS Se-Kota Samarinda Tahun 2023**

Kecamatan	Individu	Keluarga
Palaran	20.367	7.697
Samarinda Seberang	14.531	5.811
Samarinda Ulu	26.253	10.332
Samarinda Ilir	19.505	7.618
Samarinda Utara	29.149	10.928
Sungai Kunjang	21.090	8.737
Sambutan	14.390	5.890
Sungai Pinang	20.335	8.855
Samarinda Kota	6.671	2.915
Loajanan Ilir	1.481	5.398
<b>TOTAL</b>	<b>183.812 Jiwa</b>	<b>74.215 KK</b>

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2024

Dengan adanya DTKS ini pemerintah berharap masyarakat fakir miskin dapat hidup sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.. Usaha lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengamen, namun pelaksanaannya hanya 1-2 kali dalam setahun, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 6 : Kegiatan Himbauan dari Dinas Sosial Kota Samarinda**



Sumber : Instagram Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang diberikan kepada pengamen yang sudah mengikuti pembinaan adalah monitoring. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melakukan monitoring kepada pengamen yang merupakan masyarakat Kota Samarinda jika sudah dikembalikan kepada keluarganya. Hal ini bertujuan agar pengamen yang sudah mengikuti pembinaan tadinya tidak kembali turun kejalanan lagi untuk mengamen. Pengamen yang merupakan masyarakat Kota Samarinda juga didaftarkan sebagai penerima DTKS dengan koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama RT setempat. Hal ini bertujuan agar pengamen dapat hidup sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bantuan tersebut.

Namun tidak ada sanksi tegas yang dapat diberikan kepada pengamen yang terjaring razia karena tidak ada hukum yang mengatur pengamen. Serta pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya 1-2 kali dalam setahun yang dapat dikatakan kurang sehingga masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada pengamen. Dengan adanya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ini tetap saja masih ada pengamen yang berkeliaran di Kota Samarinda. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak memberikan efek yang lebih baik kepada pengamen.

***Faktor Penghambat dalam Upaya Pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Masalah Sosial Pengamen di Kota Samarinda***

1. Anggaran yang minim, faktor penghambat yang paling utama adalah anggaran yang minim. Namun 3 tahun terakhir pembinaan tetap berjalan namun anggaran yang didapatkan minim.
2. Kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya gedung/ruangan milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang cukup luas untuk tempat pelaksanaan bimbingan sehingga beberapa tahun terakhir bimbingan dilakukan di Hotel Radja dan Hotel Grand Sawit.
3. Kurangnya pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda hanya 2 kali dalam setahun sehingga bimbingan yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada pengamen.
4. Kurangnya jumlah aparatur, jumlah aparatur pada bidang Rehabilitasi Sosial saat ini hanya berjumlah 8 orang dimana 8 orang sangat tidak cukup untuk melakukan tugas-tugas bidang Rehabilitasi Sosial yaitu pelayanan kepada 17 kategori PMKS sehingga 1 aparatur harus menangani 2-3 PMKS.
5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, setiap tahun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melakukan sosialisasi kepada masyarakat hanya sebanyak 1-2 kali. Sehingga tidak ada pemahaman maupun partisipasi masyarakat dalam menekan jumlah pengamen.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus penelitian, yaitu :
  - a. Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda berupa *assessment* latar belakang pengamen serta diberikan nasehat.
  - b. Bimbingan hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yang seharusnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Bimbingan pertama diberikan kepada pengamen dan bimbingan kedua diberikan kepada keluarga pengamen.
  - c. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Pelatihan yang dilakukan terdiri, tata boga, menjahit, perbengkelan, komputer (bagi mereka yang bisa dan paham menggunakan komputer).
  - d. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda berupa monitoring kepada pengamen yang merupakan warga Kota Samarinda agar tidak kembali mengamen.
2. Faktor penghambat dalam upaya pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi masalah sosial pengamen di Kota Samarinda adalah anggaran yang minim, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pelaksanaan bimbingan, kurangnya jumlah aparatur pada Bidang Rehabilitasi Sosial, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

### ***Saran***

Saran yang dapat penulis berikan ialah bagi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda bahwa upaya pembinaan kepada pengamen ini belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan penganggaran kembali atas kurangnya anggaran yang diperlukan dalam pembinaan, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana seperti gedung/ruangan yang cukup luas untuk pelaksanaan bimbingan, diperlukan pelaksanaan bimbingan secara rutin tiap tahunnya, diperlukan juga adanya perekrutan aparatur pada bidang Rehabilitasi Sosial serta diperlukan kegiatan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat baik melalui secara langsung ataupun melalui media sosial berbentuk gambar/video.

### **Daftar Pustaka**

Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.

- Dunie, Wayan. 2018. Pengaruh Pengarahan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Telkom Belitang Oku Timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 16(2), 107-116. Diunduh dari : <https://www.researchgate.net/publication/343380152>
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1-12. Diunduh dari : <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- Kristiana, D. 2009. Interaksi Sosial pada Pengamen di Sekitar Terminal Tirtonadi Surakarta. *Jurnal UMS* . Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diunduh dari : <https://eprints.ums.ac.id/6654/1/F100050082.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 *Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis , Anak Jalanan, dan Gelandangan*.
- Riniwati, Harsuko. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia. (Aktivitas Utama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Malang: UB Press
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Terry, George R. 2005. *Manajemen dalam Suatu Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winkel, W,S. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.